




IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2013 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, LAKIP ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Proses penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses tersebut dimulai dengan perancangan kinerja, pengumpulan data kinerja dan berakhir dengan penyusunan laporan kinerja.

Selain itu, penyajian informasi dan penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2013 ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.





Secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan capaian kinerja dari 6 (enam) tujuan strategis dan 8 (delapan) sasaran. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak 74 Indikator dengan 11 IKU Dominan. Simpulan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas Kinerja Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) tujuan strategis dari 6 (enam) tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya telah mencapai 100,00% yaitu:
 - 1) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 - 2) Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara;
 - 3) Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah.

Sedangkan 3 (tiga) tujuan strategis yang belum mencapai hasil optimal, yaitu:

- 1) Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik;
 - 2) Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 3) Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
2. Sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut:
 - ✚ Sasaran 1 dari Tujuan 1: Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00%
 - ✚ Sasaran 3 dari Tujuan 2 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00%
 - ✚ Sasaran 4 dari Tujuan 3 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%
 - ✚ Sasaran 7 dari Tujuan 5 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00%
 - ✚ Sasaran 8 dari Tujuan 6 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%

Sedangkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang belum optimal yaitu :



- + Sasaran 2 dari Tujuan 2 : Dari 1 IKU dominan tercapai 68,75%
- + Sasaran 5 dari Tujuan 4 : Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00%
- + Sasaran 6 dari Tujuan 5 : Dari 1 IKU dominan tercapai 91,84%

3. Rata-rata kinerja IKU *Outcome* Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 114,26%;
4. Rata-rata kinerja Indikator *Output* Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 99,80%.


Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, didukung dengan anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp15.488.681.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.448.285.000,00 atau 93,28% dari anggarannya. Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD/BLUD lainnya maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.932.911.000,00.

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Komunikasi dan intensifikasi atas tindak lanjut atas temuan pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah baik kepada Rendal maupun instansi pemerintah pusat/daerah terkait masih perlu ditingkatkan;
2. Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 masih perlu diintensifkan pada Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Kegiatan sosialisasi dan atau Tata Kelola APIP pada Pemerintah Daerah masih belum dipetakan.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan perlu dibuat strategi pada tahun 2014 sebagai berikut:



- 
1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan kegiatan Peningkatan Kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Untuk meningkatkan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah daerah se wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Melakukan pemetaan terhadap Pemerintah Daerah yang telah dan belum dilakukan sosialisasi dan atau *assessment* tata kelola APIP, sehingga tahun 2014 akan mengutamakan sosialisasi dan atau *assessment* tata kelola APIP terhadap Pemerintah Daerah yang belum;
 4. Mempertahankan hubungan dengan mitra kerja (stakeholders) dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMD dan RSUD sesuai kebutuhan kebutuhannya;
 5. Memperhatikan ketersediaan anggaran yang terbatas, diupayakan agar Pusat mempertimbangkan menggunakan dana mitra.
 6. Untuk lebih meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit optimalisasi penerimaan negara akan lebih intensif melakukan koordinasi dengan auditan yang belum menyelesaikan tindak lanjut.
 7. Terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan FCP dan Eskalasi/Klaim akan dilakukan :
 - a. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2014 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP.
 - b. Melakukan koordinasi kepada pemda dan BUMD serta memberikan intruksi pada Bidang APD, Bidang Akuntan Negara dan Bidang IPP agar kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan eskalasi/klaim dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Bidang Investigasi.

Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, LAKIP ini diharapkan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih dirasakan.

Kepala Perwakilan,



Edy Karim

NIP. 19560412 197801 1 001

